

**Layanan Sosial Bina Remaja dalam Perspektif Inovasi Program di dalam Kelembagaan
(Suatu Kajian Penanganan Program Bimbingan Sosial dan Keterampilan
di Dalam Proses Pendidikan dan Pelatihan)**

Taufiq Hidayat

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura, Pamekasan
tauhidsosial@gmail.com

ABSTRAK

Kepentingan hidup manusia yang memiliki arti akan dihadapkan pada masalah. *Trend* permasalahan sosial selalu mendapatkan sorotan publik, dan memiliki dimensi dampak yang cukup luas dari beragam masalah yang mempengaruhinya, salah satunya tentang kemiskinan. Jutaan warga negara Indonesia masih hidup dalam kemelaratan. Kemelaratan terjadi ada beberapa sebab yakni anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan, terdapat kelompok anak-anak tertentu yang terkena dampak paling rentan yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin, dan masih belum mempunyai akses mengenyam dunia pendidikan formal selayaknya. Oleh karena itu, pelayanan sosial dalam kegiatan asuhan, bimbingan, latihan dan bantuan yang ditujukan kepada perorangan tertuang dalam Peraturan Gubernur nomor 119 tahun 2008 yang didalam konsiderannya ada pada Pasal 1, ayat b dan c. Dari latar belakang masalah itu, muncul rumusan masalah, bagaimanakah model penanganan bimbingan sosial dan keterampilan di UPT PSBR kedalam pengembalian fungsi sosialnya selama dalam periodisasi binaan? Untuk dapat menjawab permasalahan itu sesuai harapan, maka metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dari kajian pustaka ini adalah teknik analisis domain (*domain analysis*), dengan menggunakan teknik ini, maka gambaran-gambaran pada suatu penyebab masalah dari apa yang terjadi dalam pelayanan sosial bina remaja dapat ditemukan nilai dan derajatnya sesuai yang diharapkan. Dari hasil analisis data sekunder, ditemukan kurang terpenuhinya potensi sumber daya pekerja social (Peksos), pola penanganannya yang masi mengedepankan target pencapaian program, dan belum tercukupinya instrument 3 M (*Man, Money, Method*) dalam pola penanganan program bimbingan social dan keterampilan kerja kedalam pengembalian fungsi sosialnya selama dalam periodisasi binaan. Hal yang demikian itu, melahirkan temuan Pendekatan Model Inovasi Program Bina Remaja dalam pola penanganan program bimbingan bina remaja selama periodisasi binaan melalui tri model yakni model terkendali, model terarahkan dan model terkondisikan.

Kata kunci: Potensi Peksos, Instrumen Tri M, Model Inovasi.

Abstract

The meaning of human life will be faced with problems. Trend social problems always get the public spotlight, and have a fairly broad dimension of impact from the various problems that affect them, one of which is poverty. Millions of Indonesian citizens still live in squalor. There are several destitution, because Indonesian children cannot enjoy further

education, there are certain groups of children who are most vulnerable to the impact, most of whom come from poor families, and still do not have access to formal education as appropriate. Therefore, social services in the activities of care, guidance, training and assistance aimed at individuals are contained in Governor Regulation Number 119 of 2008 which is in the preamble to Article 1, paragraphs b and c. From the background of the problem, a problem formulation emerged, how is the model for handling social guidance and skills at the UPT PSBR into a return to social functions during the assisted period? To be able to answer the problem as expected, the method used to achieve the objectives of this central study is the domain analysis technique (domain analysis). By using this technique, the values and degrees of what is happening in the social services for youth development can be found in the values and degrees as expected. From the results of secondary data analysis, it was found that the potential resources of social workers (Peksos) were not fulfilled, the handling patterns were still prioritizing program achievement targets, and the inadequate 3 M instruments (Man, Money, Method) in the handling pattern of social guidance programs and work skills into the return of its social function during the fostered period. This has led to the finding of the Youth Development Program Innovation Model Approach in the handling pattern of the youth development guidance program during the guidance period through tri models, namely controlled models, directed models and conditioned models.

Keywords: *Peksos Potential, Tri M Instrument, Innovation Model.*

A. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk hidup melekat dengan proses kelahirannya. Sebagai suatu yang berproses, manusia dalam hidup memiliki arti penting. Arti penting dari suatu proses manusia, apabila dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat memecahkan masalah hidupnya-baik sebagai individu maupun sebagai yang berhimpun. Sebab kepentingan hidup manusia yang memiliki arti akan dihadapkan pada masalah. Masalah adanya bagi masyarakat, dalam *trend* permasalahan sosial selalu mendapatkan sorotan publik, dan memiliki dimensi dampak yang cukup luas dari beragam masalah yang mempengaruhinya, salah satunya tentang kemiskinan. Jutaan warga negara Indonesia masih hidup dalam kemelaratan. Data UNICEF tahun 2016 sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan

yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) (dalam Jakarta, CNN Indonesia). Begitu pula data statistik yang dikeluarkan oleh BPS, bahwa di tingkat Provinsi dan Kabupaten menunjukkan terdapat kelompok anak-anak tertentu yang terkena dampak paling rentan yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. -- Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan negara sesuai amanat UUD 1945. Namun, hingga usia 71 tahun kemerdekaan RI, segenap masyarakatnya masih belum mempunyai akses mengenyam dunia pendidikan formal selayaknya. (Dalam Ar Rahadian@chaqial).

Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, mengumumkan hasil penelitian hasil

bantuan siswa miskin Endline di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Ada temuan menarik. Sebanyak 47,3 persen responden menjawab tidak bersekolah lagi karena masalah biaya, kemudian 31 persen karena ingin membantu orang tua dengan bekerja, serta 9,4 persen karena ingin melanjutkan pendidikan nonformal seperti pesantren atau mengambil kursus keterampilan lainnya. Mereka yang tidak dapat melanjutkan sekolah ini sebagian besar berijazah terakhir sekolah dasar (42,1 persen) maupun tidak memiliki ijazah (30,7 persen). Meski demikian, rencana untuk menyekolahkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ternyata cukup besar, yakni 93,9 persen. Hanya 6,1 persen yang menyatakan tidak memiliki rencana untuk itu. Hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 mengungkap, sebanyak 10.945 anak usia 7-17 tahun terpaksa putus sekolah dan memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Keberadaan mereka tersebar di 16 kabupaten/kota di Jawa Timur. Sebenarnya, menurut Kepala Data Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Hary Soegiri, hasil pendataan menunjukkan angka lebih banyak, yakni mencapai 12.955 anak. Namun sisanya sebanyak 2.010 berhasil diatasi melalui Program Pengurangan Pekerja Anak, dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PKH) 2012 (Dalam Debi Irma Chisbiah, 2013). Hal yang demikian itu menunjukkan bahwa angka anak putus sekolah di Jawa Timur masih tinggi.

Tingginya angka penduduk usia kerja hanya akan menjadi bonus (*window of opportunity*) apabila penyediaan kesempatan kerja sudah sesuai dengan

jumlah penduduk usia kerja serta ditopang oleh kualitas angkatan kerja yang baik. Triyas menambahkan, seperti siklus, kasus anak putus sekolah saling mempengaruhi satu sama lain dengan persoalan kemiskinan. Putus sekolah mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran, bahkan menambah kemungkinan kenakalan anak dan tindak kejahatan dalam kehidupan sosial masyarakat. Begitu seterusnya karena tingkat pendapatan yang rendah, akses ke pendidikan formal pun sulit dicapai. (Dalam Ar Rahadian@chaqial). Kaum miskin itu, dalam kata-kata Gabriel Marquez, adalah kekuatan yang membisu.

Hal yang demikian itu, menjadikan manusia banyak dihadapkan oleh berbagai persoalan-persoalan yang cukup rumit, pelik dan ber-anekaragam. Keanekaragaman persoalan yang dihadapi manusia berfluktuatif (naik turun). Dalam suatu keadaan yang berfluktuatif dari persoalan yang dialaminya, maka manusia jelas harus bisa mampu memposisikan diri sebagai agen pembaharu yang mau – tidak mau, suka – tidak suka harus dilakukan dengan berbagai metodika. Metodika sebagai bagian dari akal budi manusia yang diperoleh dari kriteria kebenaran logika manusia itu sendiri, yakni logika yang disebut sebagai logika pragmatis, logika induktif dan logika deduktif. Logika pragmatis yang diajarkan oleh Charles Pierse dinyatakan bahwa suatu pernyataan adalah benar bila pernyataan atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Logika induktif sebagai suatu kebenaran dari ajaran Bertrand Russel dikatakan bahwa suatu pernyataan adalah benar bila pernyataan itu ber-korespondensi dengan obyek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Kemudian Logika deduktif sebagaimana ajaran Plato

dan Aris Toteles, menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar apabila pernyataan itu koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Dari pemahaman metodika yang melekat pada diri manusia dengan proses kelahiran masalah dan aktivasinya, menjadikan manusia memiliki motivasi dan orientasi sebagai pilihan untuk memenuhi ketercapaian tujuan dari suatu tuntutan hidupnya, sehingga manusia harus bisa secara optimal mampu memainkan peranan dan partisipasi pada semua dimensi struktural dan fungsional secara cermat dan tepat guna.

Dalam buku *Revolusi Cara Belajar (The Learning Revolution)* ditegaskan bahwa ... Jika masalah anda telah terdefiniskan secara sistematis, cobalah memvisualisasikan beberapa jawaban. Ingatlah bagaimana teori relativitas muncul ketika Einstein membayangkan bepergian ke ruang angkasa mengendarai sinar bulan. Artinya masalah dapat terjawab atau terpecahkan jika kita dapat memvisualisasikan diri. Kemudian, dalam buku bacaan yang sama seperti tersebut di atas, dijelaskan bahwa... Pemetaan pikiran juga merupakan alat kreatif yang sangat baik – untuk menghubungkan informasi dengan cara-cara baru, pada cabang-cabang baru, pada bagian-bagian baru, sehingga ide potensi sumber manusia tidak sekedar terpaku pada satu dimensi.

Pandangan itu, menginspirasi kita sebagai potensi sumber manusia pekerja sosial pada dimensi gerakan untuk bervisualisasi diri kedalam peran pemecahan permasalahan sosial, baik secara individual maupun secara kelembagaan. Pemecahan permasalahan social yang terbangun dari salah satu prosesnya adalah dimensi program - program layanan sosial menjadi

akomodatif dan inovatif dalam memenuhi harapan penerima manfaat programnya. Dalam mencapai suatu harapan, maka potensi sumber daya manusia adanya dituntut bisa mampu menggunakan indra sebagai metodika berpikir cerdas dan sistematis, agar individu pekerja sosial dapat mudah memetakan arah buah pikiran, kemana potensi sumber daya kesejahteraan sosial harus melangkah dan dengan cara apa melangkahnya untuk memecahkan permasalahan sosial yang berkaitan dengan layanan sosialnya yang ada di dalam kelembagaan, seperti UPT PSBR. Lembaga ini merupakan representasi dari implementasi kebijakan publik yang bergerak dalam usaha kesejahteraan sosial sebagaimana tertuang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Peraturan Gubernur nomor 119 tahun 2008 yang didalam konsiderannya menyebutkan bahwa pembentukan dan pelaksanaan tugas Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) adalah ketentuan umum Pasal 1, ayat b, c d, e, f. Ayat b menyebutkan, Usaha kesejahteraan sosial adalah semua upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, pembinaan, memelihara, memulihkan dan pengembangan kesejahteraan sosial. Ayat c menyebutkan bahwa pelayanan sosial adalah kegiatan asuhan, bimbingan, latihan dan bantuan yang ditujukan kepada perorangan, keluarga dan kelompok masyarakat yang karena berbagai sebab memerlukan pertolongan agar dapat berfungsi dalam kehidupan sosialnya dan berpartisipasi dalam pembangunan. Ayat d Rehabilitasi sosial adalah kegiatan asuhan, bimbingan, latihan dan penyaluran yang ditujukan kepada perorangan, yang karena berbagai sebab mengalami hambatan fisik mental dan sosial agar dapat kembali berfungsi dalam kehidupan sosialnya secara sehat

dan berguna, serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Ayat e menyebutkan, Pengembangan adalah peningkatan kapabilitas sumber daya manusia penyandang masalah kesejahteraan sosial maupun pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial. Ayat f menyebutkan bahwa perlindungan sosial adalah pelayanan sosial bagi individu dan keluarga yang mengalami kegagalan atau kehilangan hak, serta perannya akibat faktor dari luar. Kegagalan atau kehilangan yang diakibatkan dari luar penting meningkatkan kualitas layanannya.

B. LANDASAN TEORITIS

Berpijak pada latar belakang masalah di atas, maka dapat diuraikan tentang berbagai pemikiran teoritis tentang kebijakan program dalam pelayanan publik. Ini erat kaitannya dengan tujuan penulisan artikel, yang ingin mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif masalah sosial, sehingga dapat membentuk suatu model inovasi yang strategis dalam pelayanan sosialnya. Konsekuensi logis yang ditimbulkan dari suatu kebijakan program pelayanan sosial yang digulirkannya melahirkan dampak yang diharapkan dan mengeliminir yang tidak diharapkan. Mengingat Program dalam pelayanan dibidang sosial adalah merupakan wujud dari implementasi kebijakan publik.

Pemerintahan bukanlah suatu konsep yang asing untuk kebijakan sosial. Disiplin ilmu pengetahuan kebijakan sosial selalu menjadi daya menarik di dalam pemerintahan, bahkan sekalipun disiplin itu tidak memiliki nama. Dalam sebuah buku pengantar kebijakan sosial (1974), Titmuss, menyatakan bahwa, administrasi sosial sebagai studi terhadap struktur organisasi kemasyarakatan

tertentu dan struktur formal yang memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dia melanjutkan bahwa dia ingin menjelaskan pokok bahasan dari disiplin itu yang mencakup 'struktur, sejarah dan organisasi, praktek serta prinsip-prinsip tindakan kolektif (ekonomi, sosial, politik) yang melebur ke area kesejahteraan sosial (ibid: 58). Donnison dan Chapman memiliki pemahaman yang hampir sama dalam disiplin. Pada tahun 1965 mereka menjelaskan tentang bidang administrasi sosial sebagai tindakan kolektif untuk kesejahteraan sosial yang lebih baik. Inti dari disiplin ilmu pengetahuan itu baik yang dikemukakan oleh Titmuss, Donnison dan Chapman memiliki kemiripan atas definisi mengenai istilah pemerintah yang sekarang begitu luas digunakan: organisasi dalam melakukan tindakan kolektif (Prakash dan Hart, 1999). Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa pemerintahan menghasilkan sesuatu yang menarik yaitu disiplin ilmu kebijakan sosial.

Dalam menganalisa nilai pemerintahan untuk kebijakan sosial, ada banyak sekali pertanyaan yang muncul. Berikut ini tiga pertanyaan diantara pertanyaan-pertanyaan lain yang paling kritis: 1). Apakah pemerintahan sebagai suatu konsep atau pendekatan memberikan dana dalam memperluas organisasi atau manajemen dalam suatu kepentingan atau pencapaian tujuan? 2). Apakah pemerintahan memiliki lebih dari satu konsep deskriptif dan jika demikian, pendekatan yang mana yang dianggap bermasalah? 3). Seberapa bagus sebuah konsep atau pendekatan dalam melakukan penganalisaan dan memahami kebijakan sosial?

Diantara isu-isu yang membuat pemerintah tertarik untuk menganalisanya

adalah isu-isu lokal, regional dan isu-isu tingkat nasional, peran negara dan hubungannya dengan masyarakat sipil, penempatan kembali berbagai kelompok kepentingan dan penyusunan, orientasi dan pengimplementasian kebijakan-kebijakan. Disamping argument yang dibahas disini, ada juga unsur-unsur empiris dan teoritis yang tidak jelas serta yang ada kaitannya dengan pemerintah yaitu kapasitas sosial. Namun penting diperhatikan bahwa konsep-konsep tersebut perlu dibenahi kembali apabila konsep tersebut akan dikembangkan dalam menganalisa kebijakan social dalam program pelayanannya, sehingga kebijakan yang diformulasikan, diimplementasikan dan dievaluasi dapat memberikan nilai efektifitas dan efisiensi serta dampak terhadap permasalahan kehidupan sosial masyarakat yang dihadapinya.

Berpijak dari pandangan teori sebagaimana yang dijadikan sebagai tolok ukurnya, maka dapat dikatakan bahwa peran program dalam pelayanan sosial sangat mempunyai arti penting dan strategis, sehingga dapat dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintahan dalam kebijakan sosialnya dan masyarakat dalam mencapai tujuan pemanfaatan dan penggunaan pelayanan sosial yang diharapkan. Kesemua proses dalam upaya mencapai keberhasilan pemanfaatan dan penggunaan pelayanan sosial yang diharapkan masyarakat, terkandung didalam beberapa persoalan yang paling kompleks. Kompleksitas persoalan itu, dapat dilihat analisa kualitas pelayanan publik yang dinamis.

Dalam program pelayanan sosial, untuk mencapai tujuan dapat dilihat dari cakupan hal-hal yang berkaitan dengan jumlah dan jenis orang yang dilayani dan macam jasa yang hendak digulirkan

kedalam program, serta jenis staf yang akan menjalankan. Ini menjadi penting dan strategis dipahami dalam pengambilan kebijakan publik untuk dapat memenuhi tujuan dari program dalam pelayanan sosial. Karenanya perlu dilaksanakan spesifikasi, seberapa besar atau lama penyimpangan dan penyalahgunaan program dalam pelayanan terjadi? dan apakah dapat ditoleransi atau tidak? Sebab jika tujuan kebijakan yang terlalu umum, kabur ataupun elemen-elemen yang tersedia saling bertentangan, maka hal ini dapat menimbulkan persoalan dalam pelayanan. Persoalan yang ditimbulkan biasanya hasil kegiatan yang dilaksanakan pemerintah (*outcome*). Oleh karena itu Hogwood dan Gunn sebagaimana dikutip Abdul Wahab (1990) menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan publik hanya dapat dimulai apabila tujuan atau sasaran yang bersifat umum telah diperinci, program-program aksi telah dirancang, sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, sehingga hal ini merupakan syarat pokok bagi implementasi kebijakan publik. Edward III(1980) menambahkan bahwa implementasi kebijakan publik dapat berhasil dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi.

Dari pemahaman pandangan teoritis dan data dokumen di atas, maka dapat dikatakan bahwa didalam pelaksanaan pelayanan sosial berkonsentrasi pada bagaimana mengelola kualitas dari pelayanannya, agar implementasi kebijakan programnya berjalan sinergis dengan kebutuhan dan harapan masarakat penerima manfaat dan penggunaan pelayanan. Sinergi kebutuhan dapat terbangun ke dalam penerima manfaat dan penggunaanya, maka indikator yang bisa dijadikan sebagai tolok ukurnya

adalah pandangan teori Parasuraman, Zeithaml dan Berry (1991) bahwa untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas diperlukan syarat-syarat: (1) harus menetapkan standar pelaksanaan yang spesifik; (2) adanya komunikasi; dan (3) tidak adanya kesenjangan antara jasa yang diharapkan masyarakat dengan layanan yang diberikan oleh unit pelayanan. Philip Kotler (1994) menambahkan bahwa kualitas pelayanan yang diharapkan dapat dilakukan oleh unit pelayanan apabila mempunyai ciri sebagai berikut: (1) *Reliability* adalah kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya; (2) *Responsiveness* adalah kemampuan untuk membantu masyarakat dan memberikan jasa dengan cepat atau tanggap; (3) *Confidence* adalah pengetahuan dan kesopanan para aparat pelayanan, serta kemampuan dalam menumbuhkan atau menimbulkan kepercayaan; (4) *Emphaty* adalah memberikan perhatian pribadi bagi masyarakat; (5) *Tangible* adalah merupakan penampilan fasilitas fisik peralatan personel dan media komunikasi. Philip Kotler, menambahkan bahwa tingkat pelayanan menunjukkan kinerja yang baik apabila tingkat perasaan individu atau masyarakat setelah dibandingkan kinerja hasil yang dirasakan dengan harapan. Sedangkan kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila kinerja di bawah harapan maka masyarakat akan kecewa, dan apabila kinerja sesuai dengan harapan masyarakat akan puas. Kemudian apabila kinerja melebihi harapan, masyarakat akan sangat puas. Harapan masyarakat dapat dibentuk oleh pengalaman masa lampau, komentar masyarakat dan informasi unit pelayanan, serta unit pelayanan harus menciptakan dan mengelola suatu sistem untuk

memperoleh kemampuan mempertahankan kinerja.

C. METODE

Metode dalam kajian pustaka ini merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam kepentingan analisa model penanganan bimbingan social dan keterampilan di UPT PSBR kedalam pengembalian fungsi sosialnya selama dalam periodisasi binaan adalah kualitatif. Analisis kualitatif, biasanya dianggap sebagai sebuah proses aktivitas yang berusaha menganalisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pendeskripsian dalam pemaknaan dan pembentukan kesimpulan katagoris atau ciri-ciri umum tertentu. Mengingat jenis dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian deskripsi kualitatif, maka penggunaannya untuk maksud memberikan penjelasan pada studi sosiologi dengan difokuskan pada tindakan model penanganan bimbingan social dan keterampilan di UPT PSBR kedalam pengembalian fungsi sosialnya selama periodisasi dalam binaan yaitu memberikan penjelasan peranan aktor dengan keperluannya melalui deskripsi kualitatif (untuk model penanganannya), sedangkan keperluannya untuk memberikan penjelasan artikulasi pemenuhan kebutuhan diri dan sasarannya atau organisasinya.

Dalam memulai mengikhtisarkan data untuk kepentingan penelitian pustaka ini, peneliti menggunakan data sekunder berdasarkan sumber bacaan yang ada relevansinya dengan kerangka pemikiran yang dijadikan penuntun penelitian pustaka. Setelah secara mandiri melaksanakan klasifikasi terhadap data sekunder sebagai kemungkinan pengaruh yang mendorong, memperkuat atau

memberikan kecenderungan pada pemeriksaan perilaku kelompok dan individu klien penerima dan penggunaan manfaat kedalam program bimbingan social dan keterampilan kerja, maka peneliti berupaya mengikuti saran Spradley (dalam Bungin, 2001) yakni dengan menemukan hubungan semantik (*semantic relation ship*) yang bersifat universal dalam analisa domain sebagai berikut: Jenis, (*strict inclusion*); ruang (*spatial*); sebab-akibat(*cause-effect*); rasional (*rationale*); lokasi kegiatan (*locationale*); cara ketujuan (*means-end*); fungsi (*function*); urutan (*sequence*); atribut (*atribution*). Selanjutnya peneliti, dalam hubungan bagaimana peneliti menggunakan teknik analisis domain, maka peneliti melaksanakan enam langkah dari Spadley yakni : memilih pola hubungan semantik tertentu atas dasar informasi ...yang tersedia dalam sumber bacaan peneliti; menyiapkan lembaran kerja analisis domain...mencari konsep-konsep induk dan kategori-kategori simbolis dari domain tertentu yang sesuai dengan suatu pola hubungan semantik serta menyusun pertanyaan-pertanyaan struktural untuk masing-masing domain, dan dalam temuan yang dilaporkan di sini, peneliti menggunakan kata-kata untuk menggambarkan faktor-faktor atau tema-tema yang muncul. Dengan menggunakan teknis analisis domain maka gambaran-gambaran pada suatu penyebab masalah dari apa yang terjadi dalam pelayanan sosial bina remaja dapat ditemukan nilai dan derajatnya sesuai yang diharapkan. Ini menjadi penting, sebab konsep-konsep induk dan katagori-kategori simbolik dari suatu domain analisis tentang penyebab yang diduga dominan dalam setiap penyelenggaraan kepentingan layanan sosial bina remaja dapat diuji sesuai hubungan-hubungan semantiknya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dan dengan tetap memperhatikan kemungkinan dinamika konteks yang akan peneliti selami, maka tindakan model penanganan bimbingan social dan keterampilan dari pemberi dan penerima atau pengguna manfaat adanya dalam orientasi, intervensi dan program inovasi sebagai upaya pemahaman pola pengembangan aktivasi gerakan model penanganan bimbingan social dan keterampilan kedalam pengembalian fungsi sosialnya selama dalam periodisasi dalam binaan untuk klien dalam perspektif tindakan pencapaian tujuan program layanan sosial yang dibangun dalam mekanisme, prosedur dan system yang berkembang sebagai kebutuhan dan kepentingan yang berlangsung dalam kegiatan terprogram di UPT PSBR Pamekasan sebagai pelaksana keperluan dengan berbagai programnya. Kerangka fokus penelitian pustaka ini, untuk mewujudkan model inovasi dalam mengakomodasi gap pemenuhan kebutuhan dan keperluannya terhadap klien dalam penerimaan dan pengguna manfaat yang seharusnya tidak mengabaikan peranan kepentingan, kebutuhan dan pilihan individu, kelompok pelaku dalam memberikan situasi yang kondusif yang tidak merugikan. Walaupun dari pemahaman ini masih banyak yang penting untuk diperhatikan, namun peneliti berharap dapat menemukan suatu inovasi model dalam proses artikulasi keperluan program bimbingan social dan keterampilan kerja klien yang strategis dalam tindakan mencapai tujuan pelayanan sosial dari orientasi program, intervensi program dan inovasi program pengembangan aktivasi bimbingan fisik mental dan keterampilannya, sehingga dapat menemukan serta memecahkan misteri gap layanan sosial yang diberikan,

kebutuhan dan kebuntuan pemahaman pendidikan dan pelatihan yang akomodatif dan bermartabat dalam praktek kehidupan klien.

Oleh karena itu, kaidah-kaidah program layanan bina remaja baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan, khususnya tentang kelembagaan dan peningkatan kinerja dicari dan digali, untuk kemudian dirumuskan menjadi rumusan model-model inovatif yang dituangkan ke dalam rancangan pelaksanaan program layanan sosial bina remaja yang berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam masyarakat, bukan semata-mata merupakan kehendak penguasa saja. Dalam kaitannya dengan penyusunan rancangan pelaksanaan program layanan sosial bina remaja tentang pembinaan dan atau pembimbingan fisik, mental dan keterampilan, maka kajian ini akan menjawab urgensi pelayanan sosial dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja yang berlaku eksisting, sehingga linieritas tuntutan pemenuhan dasar hidup remaja putus sekolah terlantar tersebut selama pengasramaan terakomodasikan kedalam pemenuhan kebutuhan dasarnya.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Model Penanganan Program Dalam Layanan Sosial Bina Remaja

D.1. Profil Unit Pelaksana Teknis PSRT Pamekasan

Kesejahteraan sosial yang sangat memerlukan perhatian karena permasalahannya sangat kompleks baik menyangkut Individu, Keluarga dan Masyarakat sekitar, hal ini juga sebagai dampak dari krisis multidimensional serta adanya proses globalisasi yang mendunia, mengakibatkan terganggunya

pembentukan pribadi serta kualitas hubungan dengan lingkungan secara wajar, berkaitan dengan hal tersebut Program kegiatan Panti Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Pamekasan diarahkan untuk dapat membantu menangani permasalahan dimaksud. Penanganan permasalahan kesejahteraan sosial menggunakan 2 sistem pelayanan, yaitu sistem pelayanan dalam panti dan sistem pelayanan diluar panti.

Menurut UU No. 6 Tahun 1974 pasal 3 ayat 1 menyebutkan, tugas pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan sosial adalah menentukan garis kebijakan yang diperlukan untuk memelihara, membimbing dan meningkatkan kesejahteraan sosial; melaksanakan pembinaan termasuk memupuk, memelihara dan membimbing serta meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat; melakukan pengamanan dan pengawasan pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial. Berpijak pada amanah UU tersebut, maka penting untuk institusi yang bergerak dalam usaha kesejahteraan sosial memiliki sasaran pelayanan baik yang menyangkut populasi maupun sasaran usahanya, program pelayanan, jenis-jenis kegiatan pelayanan, fasilitas pelayanan, tenaga pelaksana. Dalam mewujudkan program pelayanan yang akomodatif dalam pemanfaatan atau penggunaan sarana pelayanan kesejahteraan sosial maka fungsi yang diwujudkan adalah, sebagai:

- a. Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan meliputi :
 1. Pencegahan.
 2. Penyembuhan dan Penyantunan
 3. Pengembangan
- b. Pusat Pengembangan Informasi dan Konsultasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan:

1. Pengumpulan dan penyiaran data
 2. Penyebaran informasi
 3. Memberi bimbingan dan konsultasi
- c. Pusat Pengembangan Keterampilan, dengan fungsi panti sebagai berikut :
1. Observasi, Identifikasi dan pemeliharaan
 2. Pembinaan mental dan bimbingan kemasyarakatan
 3. Pemberian latihan keterampilan
 4. Pelaksanaan usaha penyaluran kedalam masyarakat serta pembinaan lanjut dan konsultasi lingkungan.

D.2. Sejarah Panti

Pada tanggal 1 juni 1951, seorang dermawan bernama R. Mainuddin beralamat di desa Gladak Anyar Pamekasan menyerahkan hak milik tanahnya seluas 1,9 Ha. Berlokasi di jalan Ronggosukowati Pamekasan kepada Kantor Sosial Karesidenan Madura. Penyerahan itu disertai persyaratan agar paling lambat dalam waktu 3 tahun, tanah tersebut harus sudah dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan kepada anak yatim piatu, yaitu dengan mendirikan bangunan untuk membina sedikitnya 100 anak yatim.

Pada tanggal 17 Agustus 1951, dibuatlah surat penyerahan, tanggal 22 Agustus 1951 surat tersebut disahkan oleh Wedono Pamekasan. Berangkat dari tersedianya tanah tersebut, diajukan usulan ke Departemen Sosial Pusat agar bisa didirikan Panti Asuhan di Pamekasan. Usulan tersebut langsung mendapat tanggapan dari Pusat, sehingga pada tahun 1952 berdirilah bangunan panti diatas tanah tersebut. Pada tanggal 15 Pebruari 1954, bangunan tersebut diresmikan untuk dipergunakan sebagai Panti Asuhan oleh

Bapak R.Z. Fanani (Kepala Jawatan Pekerjaan Sosial Jakarta).

Panti Asuhan yang ada di Jawa Timur pada waktu itu membina, mengasuh anak terlantar bukan saja berasal dari Jawa Timur, tetapi juga berasal dari Jawa Barat, Sulawesi dan Sumatera. Pada waktu itu bangunan yang ada adalah 2 blok asrama. Satu bangunan kantor dan satu bangunan untuk dapur dan gudang diresmikannya sebagai Panti Asuhan hingga saat ini mempunyai riwayat kegiatan sebagai berikut :

- Tahun 1954 : Resmi dipergunakan untuk mengasuh anak miskin dengan nama Panti Asuhan “ Sumbangsih “
- Tahun 1971 : Berubah menjadi Pusat Latihan Kerja (PLK)
- Tahun 1976 : Menjadi Panti Karya Taruna (PKT), berdasarkan SK. Kakanwil Departemen Sosial Provinsi Jawa Timur No. 2329/I/a-3/1976.
- Tahun 1977 : Berubah menjadi Panti Penyantunan Anak (PPA)
- Tahun 1979 : Ditetapkan menjadi Sasana Penyantunan Anak (SPA) “ Sumbangsih “ sesuai SK. Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/XI/1979.
- Tahun 1995 : Diubah menjadi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) “Sumbangsih” Pamekasan (SK. Menteri Sosial RI Nomor 22/HUK/1993, tentang Panti Sosial dilingkungan Departemen Sosial
- Tahun 2008 : Dengan peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2008 tentang uraian tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi. No. 119 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Panti Sosial

Bina Remaja (PSBR) “Sumbangsih” Pamekasan diubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Remaja Terlantar Pamekasan.

D.3. Data Fisik

1. Luas Tanah : 19.400 m², terdiri dari : Kantor, Wisma, Ruang Keterampilan.
2. Luas Bangunan :
 - a. Asrama : 750 m²
 - b. Ruang makan / Dapur : 156 m²
 - c. Workshop : 112 m²
 - d. Kantor : 320 m²
 - e. Ruang Keterampilan : 180 m²
 - f. Wisma : 120 m²
 - g. Ruang Pendidikan : 180 m²
 - h. Jalan komplek : 205 m²
 - i. A u l a : 396 m²
 - j. Wisma : 84 m²
 - k. Pagar Tembok : 400 m²
 - l. Taman : 400 m²
 - m. Rumah Dinas : 83 m²
 - n. Rumah Kopel : 186 m²
 - o. Wisma Tamu : 128 m²
 - p. Asrama : 600 m²
 - q. Ruang Keterampilan : 354 m²
 - r. Ruang Poliklinik : 258 m²
 - s. Pos Jaga : 12 m²
 - t. Garasi : 36 m²
 - u. Pagar : 300 m².
3. Alamat : Jl. Ronggo Sukowati N. 5 Pamekasan.
4. Status Tanah: Sertifikat.
5. Jangkauan Pelayanan:
 1. Kabupaten Bangkalan
 2. Kabupaten Sampang
 3. Kabupaten Sumenep
 4. Kabupaten Pamekasan.
6. Status Panti : Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

D.4. Visi

Terwujudnya anak remaja bermasalah / remaja bermasalah putus

sekolah terlantar dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas serta kreatif, inovatif, ekonomis, taat beribadah sesuai dengan keyakinan untuk kepentingan setiap warga masyarakat yang menuju keadilan sosial.

D.5. Misi

- a. Memberikan pelayanan sosial kepada anak remaja bermasalah / remaja putus sekolah terlantar untuk mencegah, mengendalikan, mengatasi masalah sosial yang dihadapi.
- b. Mencegah dan mengendalikan permasalahan sosial, memperkuat integrasi sosial dan stabilitas sosial melalui Kesetiakawanan Sosial.
- c. Mewujudkan keadilan sosial yang lebih merata dengan lebih memberikan perhatian kepada warga masyarakat rentan dan kurang mampu / beruntung.

Dari profil UPT PSBR sebagaimana terurai di atas, secara umum menunjukkan adanya upaya meningkatkan pelayanan program dalam UPT. Namun setelah peneliti melakukan kajian mendalam pada profil dan sejarahnya itu, dapat diungkap sebagai temuannya berdasarkan masalah sebagai sebab yang dianggap dominan dari hasil penilaian terhadap masalah utamanya, maka dengan penggunaan teknik analisis domain gambaran-gambaran pada suatu penyebab masalah dari apa yang yang terurai dari data sekunder ditemukan nilai dan derajatnya sesuai yang diharapkan. Nilai dan derajatnya, dapat digunakan sebagai batasan-batasan pemikiran yang terbagi atas beberapa identifikasi masalah dalam setiap penyelenggaraan kepentingan layanan sosial bina remaja di UPT PSBR Pamekasan, antara lain:

1. Domain jenis tindakan bimbingan fisik, mental dan keterampilan dalam

- hubungannya dengan kepentingan, kebutuhan dan kebuntuan adalah sejenis pendorong kemauan yang tersamarkan oleh diri pembimbing atau kelompok dalam menentukan pilihannya berdasarkan karakter fungsi tugas yang akan ditampilkan. Pertanyaan struktural dari tindakan layanan sosial adalah apakah keseluruhan jenis praktik yang terkondisikan dari oleh untuk klien merupakan pola yang membudaya bagi klien di unit-unit institusi bimbingan sosial di UPT PSBR? Jawabannya tentu tidak.
2. Domain aktor atau pelaksana layanan sosial dan dengan penerima manfaat kepentingan layanan dalam hubungan ruang antara tindakan bimbingan sosial dan keteraturan yang dibatasi merupakan bagian penentu berdasar kebutuhan layanan sosialnya. Klien bertempat di ruang penyelenggara atau pembimbing atau unit-unit institusi layanan sosial. Pertanyaan strukturalnya dari penyelenggara atau pembimbing atau unit institusi bimbingan sosial itu, juga sebagai pemegang atau pengendali peran dalam program layanan sosial yang seutuhnya? Jawabannya tidak dalam suatu kontek pengendali peran program yang seutuhnya.
 3. Domain sebab-sebab pemberi layanan atau penerima layanan dalam hubungan tindakan program layanan bimbingan sosial adalah kepentingan, kebutuhan, dan atau kebuntuan sebagai akibat dari tujuan dari program untuk meraih sukses sesuai harapan. Ketercapaian tujuan dalam harapan menjadi sebab dari personel pemberi layanan bimbingan sosial dan atau penerima layanan bimbingan sosial. Pertanyaan strukturalnya dari tindakan layanan bimbingan sosial adalah apa saja penyebab terjadinya personel layanan bimbingan sosial dan atau penerima manfaat dari layanan bimbingan sosial berdasar kebutuhannya? Jawaban itu tentu kurang dapat memenuhi kebutuhannya.
 4. Domain rasional atau alasan penyelenggara layanan bimbingan sosial di UPT PSBR Pamekasan dalam hubungannya dengan kepentingan layanan bimbingan dan biayanya adalah tingkatan kemauan baik dan tingkatan kebutuhan, serta tingkatan kebuntuan mencapai harapan dan berbagai kenyamanan layanan sosial adanya, merupakan alasan personel pemberi layanan sosial dapat menerima pemberian artikulasi suatu keuntungan dan keterbatasan sumber dana. Pertanyaan strukturalnya dari tindakan layanan bimbingan sosial adanya adalah apa saja yang menjadi alasan atau rasionalitas mereka (pemberi dan penerima) memilih target kepentingan dalam tingkatan kebutuhan dan kemauan berbagai tuntutan kreativitas dan inovasinya sebagai tempat memainkan peran aksi layanan bimbingan sosialnya? Jawabannya belum dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber dana, sumberdaya manusia dan metode penangannya.
 5. Domain konsentrasi penyelenggara layanan bimbingan sosial dan atau penerima manfaat dari layanan bimbingan sosial dalam lokus kegiatan program layanan bimbingan sosial adalah UPT PSBR di Pamekasan merupakan representasi area transaksional kebutuhan. Pertanyaan strukturalnya dari

tindakan layanan bimbingan sosial adanya adalah dimana tempat-tempat konsentrasi layanan untuk menggunakan hak kebutuhannya? Jawabannya ada pada tempat yang akomodatif dalam pemenuhan kebutuhan klien.

6. Domain kiat mengatasi penyebab dari masalah layanan sosial adalah kerja melalui model /trik/pola yang konstruktif untuk mendapatkan dukungan kemauan harapan publik dan berlegalistik dalam setiap pengambilan keputusan Pertanyaan struktural dari tindakan layanan bimbingan sosial adanya adalah apa saja keseluruhan cara/trik/model/pola yang dapat digunakan penyelenggara layanan bimbingan sosial dan penerima dari layanan bimbingan sosial dalam memanfaatkan tujuan program layanan bimbingan sosial pada pencapaian sukses gerakan sesuai dengan yang diharapkannya? Jawabannya, ada pada pola lama, trik menoton, dan kurang dalam cara menumbuhkembangkan kreatifitas yang inovatif kekinian.

Dalam konteks itulah dapat ditangkap bahwa penanganan dan pengkhususan masalah bina remaja, serta hasilnya cenderung memberikan label (*labeling*) terbentuknya remaja kedalam pengembalian fungsi sosial yang akomodatif dan konstruktif pada kemandirian usaha ekonomi produktif, yang pada gilirannya akan memberikan dampak yang dikehendaki kepada remaja itu sendiri, dan kualitas pelayanannya secara keseluruhan yang tepat kedalam tersusunnya rencana program bimbingan atau pembinaan fisik mental dan keterampilan sebagai bentuk intervensinya. Namun, pada

peruntukannya pada remaja binaan yang perlu disadari adalah proses perkembangannya yang terjadi melalui pengalaman belajar dalam lingkungan. Lingkungan belajar yang dapat mempengaruhinya adalah perkembangan sosialnya bagi kehidupan remaja selanjutnya.

Kondisi seperti itu menunjukkan arti bahwa pelaksanaan reformasi pelayanan sosial kepada klien dalam bidang kebijakan sosial yang terprogram di UPT PSBR untuk memenuhi harapan berbagai pihak, yakni:

1. Masyarakat pengguna jasa. Sebagai pemberi jasa program pengentasan permasalahan kesejahteraan sosial yang dilakukan dalam kelembagaan teknis, dianggap hal tersebut merupakan munculnya peluang yang mempermudah proses dari anggapan semula yang melekat di masyarakat bahwa orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial selalu terkait dengan apa yang memungkinkan mengalami perubahan fungsi sosialnya, sehingga muncul anggapan masyarakat “dinas sosial” adalah merupakan wadah penyelesaian masalah sosial yang ada dalam kehidupan masarakat, yang diharapkan mampu meminimal permasalahan kesejahteraan sosial yang dialami masyarakat.
2. UPT PSBR Kabupaten Pamekasan sebagai pemberi jasa program layanan sosial. Sebagai institusi atau organisasi pelaksana kebijakan layanan program sosial dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur berharap implementasi programnya yang dijalankan mampu membuahkan hasil sesuai dengan tujuan, atau paling tidak mampu menghasilkan dampak positif sebagai konsekuensi logis dari suatu penanganan masalah sosial yang

dilakukan dalam produktivitas program.

Aktivitas nyata dalam mencapai produktivitas kinerja program dalam pelayanan sosial merupakan konsekuensi logis dari corak pemenuhan kebutuhan kesejahteraan sosial. Pemenuhan kebutuhan kesejahteraan yang mampu dijadikan tumpuan hidup ke arah kesejahteraan dalam lingkungan yang bagaimanakah sumber sosial, dan ekonomi bisa menjadi “harta” yang dapat membuat kehidupan sejahtera? Dan dalam kondisi bagaimana sumber sosial, dan ekonomi tersebut dapat menyebabkan terjadinya konflik? Dalam konteks kesepakatan masyarakat yang berdasarkan persetujuan aturan formal maupun informal dalam melakukan pemerataan hasil dari sumber-sumber daya sosial, dan ekonomi ke lokasi yang kurang mendapat kesejahteraan. Persetujuan-persetujuan institusional yang dapat mencegah terjadinya hal-hal yang menguntungkan bagi pihak atau pribadi tertentu serta dapat mencegah terjadinya konflik. Tetapi apabila institusi lemah maka ... dapat menimbulkan dampak negatif (Eigen-Zucchi, Eskeland, Zmarak Shalizi, 2003). Dampak negatif yang demikian itu yang tidak diharapkan, tetapi dengan institusi yang ada, bagaimana dapat mampu memposisikan peran tugas pokok dan fungsinya sebagai relawan tenaga kesejahteraan sosial dalam pemanfaatan kekayaan sosial dan anggaran yang tersedia secara inovatif dengan berbagai resiko yang ditimbulkannya .

Inovasi untuk perlindungan dan pelayanan sosial dalam binaan remaja di dalam kelembagaan menjadi pokok bahasan penting dalam pencapaian proses perkembangan sosial binaannya, sehingga yang menjadi pertanyaan, adalah; 1. Hakikat perkembangan sosial binaan itu

sendiri untuk apa dan bagaimana? 2. Faktor apakah yang mempengaruhi perkembangan sosial binaannya, 3. Masalah apa sajakah yang berhubungan dengan perkembangan sosial binaannya, 4. Bagaimana upaya menumbuhkan kembangkan perkembangan sosial binaannya, 5. Bagaimana upaya pembimbingan atau instruktur dalam mengatasi masalah perkembangan sosial binaannya sesuai bidang bimbingannya. Hal yang demikian ini, menjadikan perkembangan sosial binaannya juga merupakan suatu hal yang penting dipahami oleh para pengasuh atau pegawai maupun orang-orang yang bertugas mendidik atau membina remaja yang sedang dalam penanganan untuk mengembangkan kepribadian dan prestasi belajar klien dalam suatu kelembagaan (asrama). Pentingnya inovasi dalam penanganan program sosial sebagai cerminan terpenuhinya tujuan dari inovasi itu sendiri. Tujuan inovasi dalam perlindungan dan pelayanan sosial bina remaja di dalam lingkup kelembagaan diharapkan dapat memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. Dapat menjelaskan perbedaan pengertian antara diskoveri (penemuan), invensi (proses inovasi atau pembaharuan yang merupakan sintesa dari unsur-unsur yang ada, dan inovasi).
- b. Dapat menjelaskan kaitan antara inovasi dan modernisasi.
- c. Dapat menjelaskan pengertian inovasi dalam perlindungan dan pelayanan sosial bina remaja di dalam kelembagaan.

Jika tujuan inovasi penanganan programnya tercapai dalam pemenuhan, maka akan melahirkan manfaat. Manfaat dari inovasi dalam perlindungan dan pelayanan sosial bina remaja di dalam

kelembagaan dapat menumbuhkan kreativitas. Kreativitas merupakan suatu tuntutan pendidikan atau pelatihan, dan kehidupan yang sangat penting pada saat ini. Kreativitas akan menghasilkan berbagai inovasi dan perkembangan baru dalam suatu kehidupan. Individu dan organisasi yang kreatif akan selalu dibutuhkan oleh lingkungannya, karena mereka dapat mampu memenuhi kebutuhan lingkungan yang terus berubah dan mampu untuk bertahan dalam kompetisi global yang dinamis dan ketat.

Pelayanan sosial dalam bina remaja merujuk kepada segala sistem yang terorganisasi untuk mendefinisikan masalahnya. Dalam konteks inilah, penanganan dan pengkhususan masalah bina remaja, serta hasilnya cenderung memberikan label (*labeling*) terbentuknya remaja kedalam pengembalian fungsi sosial yang akomodatif dan konstruktif pada kemandirian usaha ekonomi produktif, yang pada gilirannya akan memberikan dampak yang dikehendaki kepada remaja itu sendiri, dan kualitas pelayanannya secara keseluruhan yang tepat kedalam tersusunnya rencana program bimbingan atau pembinaan fisik mental dan keterampilan sebagai bentuk intervensinya.

Mengingat perkembangan remaja, yang perlu disadari adalah prosesnya. Proses perkembangan remaja terjadi melalui pengalaman belajar dalam lingkungan. Lingkungan belajar yang akomodatif dengan model inovasinya dapat mempengaruhi perkembangan sosialnya bagi kehidupan remaja selanjutnya.

Oleh karena itu, model inovasi programnya pada bina remaja di dalam kelembagaan dapat dikelompokkan menjadi tiga pendekatan, yaitu:

perlindungan terkendali, pelayanan terarahkan, dan pembinaan kondusif. Perlindungan terkendali. Perlindungan ini merupakan suatu strategi perlindungan yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendapatkan pengalaman lingkungan yang bermakna kepada remaja. Strategi ini sangat menguntungkan remaja untuk dapat memiliki kekuatan ganda (dua), yakni; a. Bangun kepercayaan diri. Remaja binaan yang percaya diri menunjukkan kemampuannya, tidak terlalu tergantung pengasuh /pembimbing/ instruktur. Apabila perlu remaja binaan datang kepada pengasuh/pembimbing/ instruktur; b. Kreativitasnya dapat berkembang. Ini menjadikan remaja tidak canggung, kebutuhan dalam kepentingan mengekspresikan dirinya yang tercukupi, kegiatan aktualisasi diri remaja dihargai dan dianggap sebagai cerminan kehidupan yang sebenarnya. Sebaliknya, bagi remaja yang kurang bisa bangun kepercayaan diri dan kurang kreativitas, maka model perlindungan ini dapat menimbulkan frustrasi, tidak tahu apa yang harus dilakukan, putus asa, cemas, bosan, bingung, dan tidak terkendalikan. Perlindungan terkendali memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut:

- Kegiatan perlindungan terkendali berpusat pada remaja.
- Memberikan pengalaman langsung pada remaja.
- Strategi perlindungan bebas kurang terstruktur, dan bersifat fleksibel.
- Kebebasan bermain tidak dibatasi.
- Hasil perlindungan dapat berkembang sesuai dengan jenis perlindungan yang diberikan dan kebutuhan remaja.

Namun perlindungan bebas dengan cirinya tersebut, tidak semata mata kebebasan mutlak, melainkan juga diikuti prosedur yang dapat mampu

menjembatani remaja binaannya tetap dalam koridor fungsional rehabilitasinya. Prosedur yang penting mendapatkan perhatian yaitu:

- Pelajari kompetensi dasar pada kelompok dan memonitor dan mengevaluasi dari setiap kemampuan remaja binaan yang akan dikembangkan.
- Dalam pelaksanaan perlindungan terkendali perlu mempertimbangkan antara lain alokasi waktu, memperhitungkan banyak dan sedikitnya bahan yang ada di lingkungan.
- Persiapkan alat-alat bermain yang bervariasi untuk menunjang kegiatan yang sesuai dengan kompetensi remaja yang diharapkan.

Pelayanan terarahkan pada bina remaja di dalam suatu kelembagaan. Pelayanan terarahkan merupakan strategi yang sepenuhnya dikendalikan pengasuh/pembimbing/instruktur dalam layanan terprogram di asrama. pengasuh/pembimbing/ instruktur lebih banyak melayani dan berbicara dengan remaja binaannya, dan remaja binaan mendengarkan, mengikuti contoh dan perintah pengasuh/ pembimbing/ instruktur yang akomodatif dalam kepentingan fungsi sosialnya. Kemudian, melakukan pendidikan riil dan latihan sesuai rencana dalam program melalui pengasuhan/ pembimbingan/instruktur. Remaja binaan yang tidak dapat menangkap contoh, dipisahkan dan dibetulkan

pengasuh/pembimbing/instruktur. Remaja binaan merasa berhasil kalau ia dapat menjalankan apa yang menjadi kehendak pengasuh/ pembimbing/instruktur. Lalu, suasana pelayanan sosial yang diwarnai oleh banyaknya perilaku remaja binaan yang tidak dibenarkan

pengasuh/pembimbing/instruktur, sehingga banyak anak membutuhkan peringatan yang terus-menerus untuk menyelesaikan tugas pokok dan fungsi pelayanannya. Ciri-ciri atau karakteristik pelayanan terarahkan yaitu:

- Berpusat pada perilaku dalam pelayanan pengasuh/pembimbing/instruktur.
- Kreativitas anak ditunjukkan kedalam kepentingan program.
- Menyajikan konsep dan berbagai materi dalam suatu proses pelayanan terprogram untuk dikuasai anak.
- Menekankan disiplin, keteraturan prosedur, dan menghargai nilai-nilai pelayanan terarah.
- Hasil layanan ditentukan oleh kegiatan-kegiatan pengasuhan/ pembimbingan/ instruktur dalam memberikan pelayanan terprogram.

Prosedur pelayanan terarahkan yang penting untuk diakomodasikan sebagai berikut:

- Pengasuh/pembimbing/instruktur menyusun rencana program layanan sosial berdasarkan kompetensi dasar yang akan dikembangkan
- pengasuh/pembimbing/instruktur menyiapkan alat-alat layanan sosialnya/ bahan-bahan permainan sesuai dengan kompetensi yang telah direncanakan.
- Dalam proses pelaksanaannya, remaja binaan dikondisikan untuk mentaati instruksi, perintah, dan larangan dari pengasuh/ pembimbing/ instruktur.
- Penilaian hasil dari layanan sosial berdasarkan pada penguasaan remaja binaan sesuai dengan apa yang diperintah pengasuh/pembimbing/instruktur.

Pembinaan terkondisikan. Pembinaan dalam pengkondisian ini merupakan kombinasi antara suasana

perlindungan terkendali dengan suasana pelayanan terarahkan. Pengasuh/pembimbing/instruktur dan remaja binaan berbagi proses pembelajaran, program dan pengalaman. pengasuh/ pembimbing/instruktur berusaha menyeimbangkan secara efektif antara kebebasan aktif bereksplorasi dan membatasi agar merasa aman ketika dalam binaan. Pengasuh/pembimbing/instruktur menciptakan lingkungan pembelajaran dan program binaan dengan penuh pilihan rasional. Keteraturan binaan dalam rutinitas program sebagai penentu keberhasilan. Kemudian, remaja binaan diberi penguatan untuk mengekspresikan diri dan menjalankan keinginannya. Meskipun tugas telah direncanakan oleh pengasuh/pembimbing/ instruktur, remaja binaan tetap berkesempatan untuk mengambil keputusan pilihan materi atau program dan bahan.

Sepanjang hari pengasuh/pembimbing/instruktur bertindak sebagai partner yang menaruh minat pada apa yang dilakukan remaja binaanya. pengasuh/pembimbing/ instruktur mengamati, mendengarkan, berinteraksi, membesarkan hati remaja binaan, dan membantu memecahkan masalahnya. Pengasuh/ pembimbing/instruktur memberi model perilaku yang benar dan mengkaitkannya dengan pengalaman remaja. Keterlibatan remaja untuk bertanggung jawab atas solusi atau hasil pemecahan masalahnya sendiri. Mencipta suasana yang supportive mendukung kebutuhan remaja. Remaja belajar aktif, mereka fokus pada binaan, dan inisiatifnya, mencoba ide, bicara tentang apa yang dilakukan, memecahkan masalah sendiri. Ciri-ciri karakteristik utama pembinaan terkondisikan antara lain:

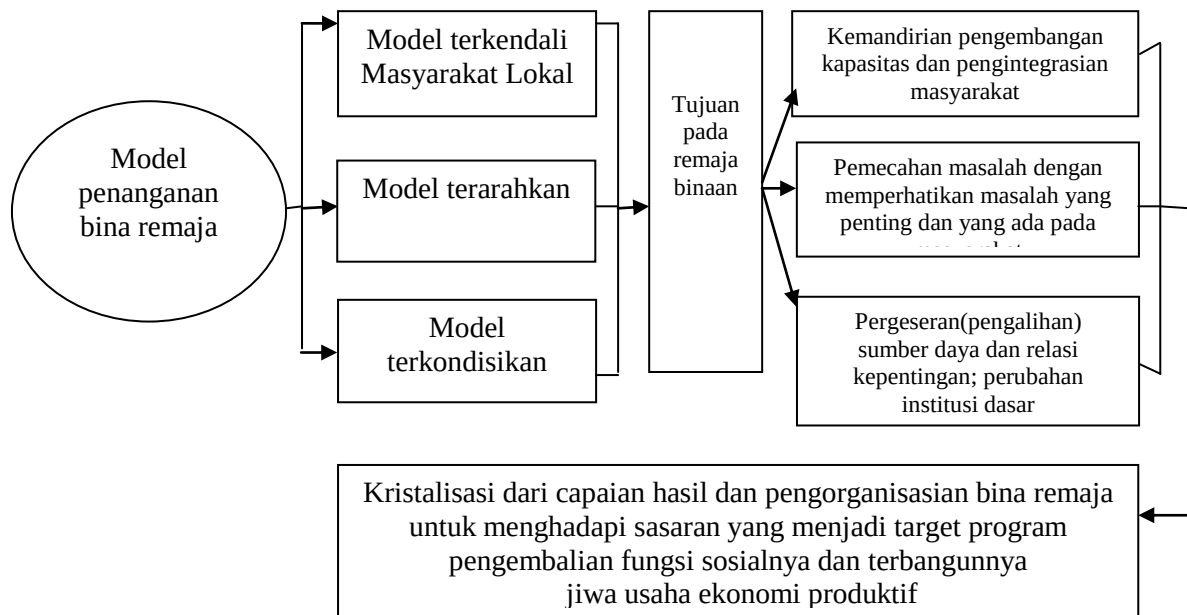
- Pengalaman dan kegiatan binaan relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan remaja binaannya.
- Menyenangkan karena bertolak dari binaan terprogram dan kebutuhan remaja binaan.
- Hasil binaan bagi remaja akan bertahan lebih lama karena lebih berkesan dan bermakna.
- Mengembangkan keterampilan berpikir remaja binaan dengan permasalahan sosial yang dihadapinya.
- Menumbuhkan keterampilan sosial dalam bekerja sama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain.

Prosedur yang harus dilalui dalam pembinaan terkondisikan sebagai berikut:

- Pembinaan kondusif dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan binaan program di dalam asrama menjadi lebih bermakna dan utuh.
- Dalam pelaksanaan pembinaan kondusif perlu mempertimbangkan antara lain alokasi waktu, memperhitungkan banyak dan sedikitnya bahan yang ada di lingkungan.
- Memilih konstruksi binaan yang terdekat dengan remaja.
- Lebih mengutamakan kompetensi dasar remaja binaan yang akan dicapai dalam target program binaannya di dalam asrama.

Bertitik tolak dari pendekatan model inovasi program yang dapat digunakan dalam peruntukannya, maka binaan untuk remaja yang selama berproses di dalam pelayanan sosialnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1: Pendekatan Model Inovasi Program Bina Remaja



Sumber : Taufik Hidayat, 2020

Dari beberapa pendekatan model inovasi program remaja binaan selama proses pelayanan sosial berlangsung di dalam kelembagaan, maka apapun yang digunakan selalu mendudukan remaja binaan sebagai pusat perhatian dan perlakuan. Perhatian dan perlakuan yang dapat dijadikan ukuran ada pada peranan pengasuh/pembimbing/ instruktur. Kemudian, pendekatan model inovasi program pelayanan sosial bina remaja yang akan diterapkan sangat ditentukan oleh pengalaman binaan atau pembimbingan yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan terprogram untuk mengeksplorasi secara aktif lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan buatan, serta berkonsultasi dengan nara sumber lain. Pendekatan model inovasi terprogram bagi remaja binaan dalam pelayanan sosialnya selama di dalam kelembagaan, penting memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Berorientasi pada kebutuhan remaja. Kegiatan perlindungan dan pelayanan

sosial bina remaja harus senantiasa berorientasi kepada kebutuhan remaja. Remaja membutuhkan upaya-upaya pendidikan atau latihan untuk mencapai optimalisasi semua aspek perkembangan baik perkembangan fisik maupun psikis (intelektual, dan sosio emosional). Hal yang demikian itu menjadikan berbagai jenis kegiatan perlindungan dan pelayanan sosial bina remaja, dilakukan melalui analisis kebutuhan yang disesuaikan dengan berbagai aspek perkembangan dan kemampuan pada masing-masing remaja.

2. Kreatif dan inovatif. Proses kreatif dan inovatif dapat dilakukan oleh pengasuh/ pembimbing/instruktur melalui kegiatan-kegiatan yang menarik, membangkitkan rasa keingin tahuan remaja binaanya, memotivasi remaja binaan untuk berfikir, dan menemukan hal-hal baru.
3. Lingkungan kondusif. Lingkungan diciptakan sedemikian menarik,

sehingga remaja dalam binaan menjadi betah. Lingkungan fisik, memperhatikan keamanan dan kenyamanan remaja beraktivitas. Penataan ruang harus senantiasa disesuaikan dengan ruang gerak remaja dalam beraktivitas dan tidak menghalangi interaksi dengan pendidik atau pembimbing atau dengan temannya.

4. Mengembangkan keterampilan hidup. Proses pembelajaran harus diarahkan untuk mengembangkan keterampilan hidup. Pengembangan konsep keterampilan hidup didasarkan pada dua tujuan yaitu: a. Memiliki kemampuan untuk menolong diri sendiri (*self help*), disiplin dan sosialisasi. b. Memiliki bekal keterampilan dasar dan beranjak dari tema jenjang selanjutnya.
5. Pembelajaran berorientasi padap prinsip-prinsip perkembangan remaja binaan yaitu:
 - a. Remaja binaan belajar dengan sebaik-baiknya apabila kebutuhan fisiknya terpenuhi serta merasakan aman dan tentram secara psikologis.
 - b. Siklus belajar remaja binaan selalu berulang.
 - c. Remaja binaan belajar melalui interaksi sosial dengan orang dewasa dan teman-teman sebayanya.
 - d. Minat remaja binaan dan keingintahuannya memotivasi belajarnya.
 - e. Perkembangan dan belajar remaja dalam binaan harus memperhatikan perbedaan individual.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Kebijakan program pelayanan sosial di UPT PSBR Kabupaten Pamekasan cukup lama, maka input dan output yang dihasilkan sepenuhnya ada dalam kesesuaian visi dan misi, namun dalam perjalanannya mampu mengakomodasikan model pelayanan sosial yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, berdasarkan temuan-temuan sumber bacaan yang dibahas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. System pelayanan sosial yang berorientasi pada kualitas telah mengacu pada semangat ketepatan waktu dan proses penyelesaian program pelayanan sosial berdasarkan waktu yang ditetapkan atau ditentukan. Ketetapan atau ketentuan adanya dalam suatu program merupakan kewajaran sesuai kondisi pendukung pelayanan yang ada atau tersedia, serta mengikuti pertimbangan kemampuan petugas dan klien secara umum sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Kondisi yang demikian ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif akomodatif dan dapat menjamin kemapanan hidup dan memenuhi pemenuhan kebutuhan yang terlegitimasi secara hukum.
- b. Keberadaan UPT PSBR di Kabupaten Pamekasan, birokrasi pelayanannya cukup sederhana dengan pola penangannya yang mengedepankan target pencapaian program yang telah ditetapkan. Sebagai konsekuensi logisnya, pencapaian kepentingan strategis kebijakan pelayanan sosialnya kurang terpenuhi secara maksimal sebab dalam pola lama,

- monoton dan kurang mengembangkan kreativitas yang inovatif terhadap tuntutan kebutuhan.
- c. Visi dan misi kelembagaan adanya kurang dapat diterjemahkan pada keutuhan pencapaian kinerja pelayanan publik, sehingga daya tarik pencapaian idealisme pelayanan dalam UPT PSBR kurang tercapai secara optimal. Kondisi ini, disebabkan masih belum tercukupinya instrument 3 M (*Man, Money, Method*) sesuai standar kebutuhan, seperti tidak adanya Pekerja sosial (Peksos). Demikian juga produk jasa layanan sosial yang ditangani kurang menyentuh kebutuhan klien atau masyarakat.
 - d. Formulasi kebijakan sosial yang menekankan pada fungsi pelayanan yang berorientasi pada kepuasan klien, telah mendorong pada kontra prestasi dari pelayanan yang terbentuk dalam model program yang terbakukan. Kontra prestasi yang terbentuk dalam model program yang terbakukan menjadikan pelayanan yang baik dan dapat memotivasi target sasaran (klien), serta berdampak pada peningkatan partisipasi klien dalam koridor peraturan dan perundangan yang berlaku dilingkungan UPT PSBR. Sementara, system pelayanan yang berorientasi pada kualitas mengacu pada ketepatan waktu dalam proses penyelesaian pelayanan cukup akomodatif.
 - e. Perspektif inovasi program pada pelayanan sosial bina remaja selama di dalam proses kelembagaan merupakan suatu tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan perkembangan yang harus dikuasai pada periodisasi remaja. Remaja yang

dalam binaan dituntut dapat bersosialisasi terhadap lingkungan yang lebih luas daripada hanya dalam lingkungan keluarga dan pembelajaran. Mereka dituntut mampu bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat orang dewasa yang lebih luas. Bertingkah laku sosial pada periodisasi remaja, berarti melakukan proses sosialisasi sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat, sehingga sukses dalam kehidupan kelompok sebaya maupun dalam masyarakat umumnya. Kemudian, bina remaja yang berkembang tingkah laku sosialnya dapat diketahui dari kemandirian sosialnya, dan kesenangan berkelompok dengan teman sebaya, sehingga dapat membutuhkan keterampilan sosial dan kepribadian yang dapat diterima dalam kelompok, serta menghindari kepribadian yang ditolak oleh kelompok. Kesemua itu menjadikan adanya peningkatan kualitas pelayanan dalam panti melalui temuan model yakni Pendekatan Model Inovasi Program Bina Remaja kedalam pola penanganannya melalui model terkendali masyarakat lokal, model terarahkan, dan model terkondisikan.

2. Rekomendasi

- a. Kesiediaan untuk mengembangkan rasa saling percaya dalam kelompok kerja (*trust within team*). Salah satu ciri dari organisasi yang modern adalah apakah di dalamnya terdapat tim kerja yang kuat dan atau yang kredibel. Adanya tim kerja yang kuat dan atau yang kredibel dapat menunjukkan bahwa visi dan misi lembaga UPT PSBR dipahami dengan baik oleh para pegawai /

pembimbing sosial. Partnership yang dibangun dengan pihak klien dan pegawai/pembimbing sosial dalam program-program yang akomodatif dalam keperluannya (*pro klien*) dapat terbangunnya *trust* di antara pegawai/pembimbing sosial dengan klien yang dalam bimbingannya. Mengingat, tujuan-tujuan program layanan sosial tidak hanya berjalan satu arah, namun berdampak pada penguatan artikulasi pemerlu lokal yang memungkinkan masyarakat turut andil dalam pengambilan keputusan / kebijakan.

- b. Sebagai temuan yang berdasarkan masalah sebab yang telah diuraikan di atas yang dianggap dominan dari hasil penilaian terhadap persoalan utamanya, maka pendekatan model inovasi program bina remaja menjadi perlu digunakan dalam peruntukan bagi penerima manfaat program layanan sosial. Hal ini untuk membangun komunikasi yang dapat menciptakan aksi, artikulasi, partisipasi dan reaksi dari oleh untuk klien yang pada gilirannya dapat memberikan pengaruh pada jenis manfaat, perubahan, program, potensi sumber adanya dan lingkungan yang membentuk lahirnya keputusan dalam bangun kemitraan, koordinasi sosial, dan dialog sebagai mekanisme akuntabilitas yang dapat dimasukkan ke dalam paradigma model layanan sosial.

REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin, 1991, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- , “Globalisasi dan Pelayanan Publik Dalam perspektif teori Governance”, Makalah ini pernah disampaikan dalam pengukuhan Guru Besar, tahun 2000 Oleh : Prof. Dr Solichin Abdul Wahab, MA, *Jurnal Administrasi Negara* Vol II, No. 1, September 2001 : 43 – 58.
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University Press, Cet Pertama, Yogyakarta, 2005.
- Akbar, Patrialis, Lembaga-lembaga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Conyers, Diana, (1992), *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga* (Penterjemah Susetiwana), Yogyakarta: Gadjah.
- Dryden Gordon, dan Vos Jeannette, *Revolusi Cara Belajar (The Learning Revolution): belajar akan Efektif Kalau Anda dalam Keadaan “Fun”* (penerjemah: Word++ Translation Service), Penyunting Ahmad Baiguni, Cetakan I, Oktober 2000, penerbit Kaifa, Bandung.
- Islamy, Irfan, “Strategi Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah: Sebuah Outline”, *Makalah yang disajikan pada seminar ‘Good Governance’*, pada tanggal. 27 April 2002, FIA, Unibraw Malang.
- Meyr, Robert R (1995), *Policy and Program Planning: A Development Perspective*, Englewood Cliff: Prentice-Hall.
- Mochtar, Zainal Arifin, *Lembaga Negara Independen: Dinamika*

- Perkembangan dan Urgensi Penataannya kembali pasca Amandemen Konstitusi*, PT. Raja.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Kartasasmita, Ginanjar (1996), *Kebijakan dan Pembangunan Sosial*, Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Nurdin, Widodo dkk, *Study Pelayanan Sosial, Remaja Putus sekolah Terlantar melalui Panti Sosial Bina Remaja, Jakarta Timur: P3KS, Press 2009.*
- Suharto, Edi (1997), *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Bandung.